
**PERBANDINGAN FENOMENA GOLONGAN PUTIH PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH
(Suatu Studi Pemilihan Pasangan Gubernur Aceh Antara Tahun 2012
dengan Tahun 2017 di Kota Banda Aceh)**

**Muhammad Iqbal, Ubaidullah
(iqbal.atjeh92@gmail.com, ubaidullah@unsyiah.ac.id)
Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Unsyiah**

ABSTRAK

Partisipasi pada dua Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Banda Aceh, di setiap pelaksanaan Pilkada mengalami penurunan angka golput, pada tahun 2012 tercatat angka golput mencapai 44%, kemudian menurun menjadi 38,7% pemilih yang golput di tahun 2017. Meskipun di 2 pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di Kota Banda Aceh tersebut mengalami penurunan angka golput di Kota Banda Aceh, namun angka golput tersebut tidak memenuhi partisipasi masyarakat yang telah di targetkan 65% oleh KIP Kota Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perbandingan Fenomena Golongan Putih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di Kota Banda Aceh pada tahun 2012 dan 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk meneliti fenomena secara lebih mendalam. Terdapat dua data yang diperoleh pada penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung terhadap 6 orang informan yang dipilih secara *purposive sampling*, terdapat 2 orang informan dari KIP dan BAWASLU sedangkan 4 orang informan lainnya dipilih dari pihak masyarakat. Sedangkan data skunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca buku teks, jurnal, dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil wawancara dengan KIP dan BAWASLU, menjelaskan bahwa pilkada yang telah berlangsung di Kota Banda Aceh berjalan dengan sukses, aman dan tidak terdapat pelanggaran. Selain itu, dari hasil temuan di lapangan, terdapat juga dua indikasi pada hasil pilkada tersebut. Pertama, Perbandingan fonemena angka Golput pada Pilkada Aceh Tahun 2012 dan 2017 di Kota Banda Aceh menunjukkan angka penurunan pemilih Golput sebesar 6%. Penurunan fenomena angka golput pada Pilkada 2017

juga menurunkan urutan Kota Banda Aceh pada urutan kedua di Provinsi Aceh dari sebelumnya menduduki urutan pertama hasil Pilkada Aceh Tahun 2012 di Provinsi Aceh. Kedua, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena angka Golput yang tinggi di pada Pilkada Aceh Tahun 2012 dan Tahun 2017 di Kota Banda Aceh adalah implikasi dari rasa kecewa masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kondisi politik Kota Banda Aceh. Kemudian juga faktor krisis legitimasi masyarakat terhadap Pemerintahan yang kebijakannya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat juga merupakan salah satu faktor tingginya fenomena angka Golput yang terjadi di Kota Banda Aceh. Oleh karena dua hal tersebut, masyarakat lebih cenderung untuk tidak menggunakan hak pilihnya dan tidak ikut serta dalam pemilu. Dengan demikian, Penyelenggara Pemilu harusnya benar-benar memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi terkait arti penting penggunaan hak politik atau hak suara terhadap masyarakat guna menghasilkan Pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Perbandingan, Pilkada Banda Aceh 2012 dan 2017, Golongan Putih

ABSTRACT

Participation in the two Governor and Vice Governor Election in Banda Aceh City, in every election have decreased the number of golput, in 2012 recorded the number of golput mencapai 44%, then decreased to 38.7% voters who golput in 2017. Although in 2 execution Aceh Governor and Vice Governor Election in Banda Aceh City has decreased the number of golput in Banda Aceh City, but the number of golput did not meet the participation of the community that has been targeted 65% by KIP Kota Banda Aceh. The purpose of this study is to know the Comparison of White Phenomenon in the Election of Governor and Deputy Governor of Aceh in Banda Aceh City in 2012 and 2017. This research uses qualitative descriptive approach to examine the phenomenon in more depth. There are two data obtained in this research, that is primary data and secondary data. Primary data was obtained through direct interviews of 6 informants selected by purposive sampling, there were 2 informants from KIP and BAWASLU while 4

other informants were chosen from the community. While the secondary data obtained from literature research is by reading textbooks, journals, and other reading materials related to this research. From interviews with KIP and BAWASLU, explained that the elections that have taken place in Banda Aceh City have been successful, safe and have no violations. In addition, from the findings in the field, there are also two indications on the results of the election. First, the comparison of phenomena of Golput in Aceh and 2012 in Aceh and 2017 in Banda Aceh showed a 6% decline in Golput voters. The decline in phenomenon of the number of golput in Pilkada 2017 also decreased the order of Banda Aceh City in second place in Aceh Province from the previous one in the first result of Aceh Local Election Year 2012 in Aceh Province. Secondly, the factors that cause the phenomenon of high Golput number in the Aceh and the 2017 Election in Banda Aceh City are the implications of the disappointment of the people of Banda Aceh City to the political condition of Banda Aceh City. Then also the crisis factor of community legitimacy to the Government whose policy is not felt directly by the public is also one factor high phenomenon of Golput number that occurred in Banda Aceh City. Because of these two things, the public is more inclined not to exercise their right to vote and not to participate in the election. Thus, the General Election Organizer should really provide understanding to the community through socialization related to the importance of the use of political rights or voting rights to the community in order to produce a Leader that fits the needs of the community.

Keywords: *Comparison, elections Banda Aceh 2012 and 2017, Abstain*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana implementasi unsur demokrasi secara prosedural, dimana kedaulatan rakyat dapat terealisasikan melalui pilihan yang sesuai dengan hati nuraninya. Pemilihan kepala daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, baik Gubernur / Wakil Gubernur maupun Bupati / Wakil Bupati atau Walikota / Wakil Walikota.

Pemilu merupakan sarana yang paling kuat untuk rakyat ikut berpartisipasi dalam system demokrasi, dimana rakyat yang akan memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpinnya di sebuah Negara, karena di sebuah Negara yang menganut system demokrasi kekuasaan paling tinggi di pegang oleh rakyat.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara yang menganut demokrasi. Pemilu dilakukan sebagai suatu sarana untuk mendapatkan pemimpin atau wakil rakyat, yang dipilih langsung oleh rakyat guna untuk mewakili kepentingan rakyat. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang dilaksanakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.

Menurut Budiardjo (Tahun 2008: 461) Pemilu juga bisa disebutkan sebagai ajang perebutan kekuasaan dimana para kandidat berusaha meyakinkan masyarakat untuk memilih mereka, misalnya dengan cara menawarkan visi misi mereka pada masyarakat, tapi hal itu semua tergantung dari masyarakat menerima atau tidak menerima yang ditawarkan para kandidat.

Pilkada menurut para ahli:

Menurut Ramlan (Tahun 1992: 181) Pemilu diartikan sebagai "mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Menurut Sudiarto pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Sebab rakyat memiliki hak untuk memilih. Makna golongan putih adalah tidak menggunakan hak pilih dalam memilih dengan berbagai faktor dan alasan, fenomena golongan putih sudah terjadi sejak diselenggarakan pemilu pertama tahun 1955, akibat ketidaktahuan atau kurangnya informasi tentang penyelenggaraan pemilu. Biasanya mereka tidak datang ketempat pemungutan suara.

Istilah golongan putih muncul pertama kali menjelang pemilu zaman Orde Baru tahun 1971. Pemerakarsa sikap untuk tidak memilih itu, antara lain Arief Budiman, Julius Usman dan almarhum Iman Maluyo

Sumali. Langkah mereka didasari pada pandangan bahwa aturan main berdemokrasi tidak ditegakkan, cenderung diinjak-injak.

Golput merupakan salah satu dari perilaku pemilih seperti yang di jelaskan oleh para ahli bahwa golput sebenarnya perilaku pemilih yang tidak ingin memberikan suaranya kepada kandidat yang ada dengan alasan apapun. Menurut Setiadi dan Kolip (Tahun 2011:3), perilaku politik adalah perilaku yang dilakukan seseorang secara individu atau secara kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Menurut Rahman (Tahun 2002: 50), perilaku politik dapat diartikan sebagai keseluruhan tingkah laku para aktor politik dan warga Negara yang dalam menifestasi konkretnya telah saling memiliki hubungan kultur politik.

Dilihat dari Pilkada 2012 angka golput di Kota Banda Aceh masih tinggi dibandingkan Pilkada 2017 sekarang, dimana pada Pilkada 2012 jumlah pemilih tetap di Kota Banda Aceh 158.454 jiwa, dari jumlah pemilih tersebut yang berpartisipasi pada pilkada 2012 hanya 89.421 suara, dari jumlah yang berpartisipasi 86.560 suara yang sah dan suara yang tidak sah berjumlah 2.861 suara dan yang tidak menggunakan hak pilihnya 69.033 jiwa, jika di persentasekan 44% yang tidak menggunakan hak pilihnya atau lebih memilih golput. (republika.co.id, Tahun 2017)

Pilkada di Kota Banda Aceh tahun 2017 jumlah golongan putih (golput) masih tinggi, dimana jumlah pemilih di Kota Banda Aceh 157.807, dari jumlah pemilih tersebut di bagi tiga bagian: Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) yang ada di Kota Banda Aceh. Dari jumlah pemilih tersebut yang berpartisipasi pada Pilkada 2017 ini hanya 96.806 pemilih, jumlah surat suara yang sah pada pilkada 2017 di kota Banda Aceh adalah 94.565 dan jumlah surat suara yang tidak sah adalah 2.241. Jika yang berpartisipasi di persenkan 61,3% dan jumlah yang golput pada pilkada 2017 di kota Banda Aceh berjumlah 61.001 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya jika di persenkan 38,7% masyarakat lebih memilih golput pada pilkada 2017 di kota Banda. (kpu.go.id, tahun 2017).

Berdasarkan data partisipasi pada 2 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Banda Aceh, di setiap pelaksanaan Pilkada mengalami penurunan angka golput, pada tahun 2012 tercatat angka golput mencapai 44%, kemudian menurun menjadi 38,7% pemilih yang golput di tahun

2017. Meskipun di 2 pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di Kota Banda Aceh tersebut mengalami penurunan angka golput di Kota Banda Aceh, namun angka golput tersebut tidak memenuhi partisipasi masyarakat yang telah di targetkan 65% oleh KIP Kota Banda Aceh. (KIP Banda Aceh, Tahun 2016)

Fenomena tersebut menarik penulis untuk meneliti permasalahan ini, terkait permasalahan golput pada pilkada 2017 khususnya di ibu Kota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh sudah memiliki fasilitas pendidikan yang memadai dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap politik yang tinggi tapi dari kedua faktor tersebut belum memenuhi target partisipasi masyarakat yang telah direncanakan oleh KIP Kota Banda Aceh dan masih tingginya angka golput, tentunya fenomena golput menjadi ancaman terhadap pesta demokrasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Angka golput yang tinggi berarti sulit mendapat dukungan dari masyarakat secara maksimal bagi pemerintah, lebih jauh lagi dapat mengarah kepada hilangnya legitimasi kepemimpinan. Kondisi seperti ini sangat tidak kondusif untuk melaksanakan pembangunan daerah maupun kegiatan pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengungkap permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai acuan dasar. Adapun teori yang digunakan adalah Teori Perilaku Pemilih dan Teori Pemilu.

1. Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih merupakan perilaku politik yang merujuk pada sebuah perilaku yang timbul dalam kontestasi pemilihan umum. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pemilihan umum pemilih menjadi subjek yang sangat menentukan terpilihnya salah satu kandidat. Dalam pemilihan umum juga tidak jarang bahwa pemilih terdaftar sebagai pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau golput. Namun golput dalam pemilihan umum juga dapat diartikan sebagai perilaku politik.

Sebelum peneliti membahas teori perilaku pemilih, ada baiknya peneliti membahas makna pemilih, menurut Firmanzah, dalam bukunya “Marketing Politikantara Pemahaman dan Realitas”, yaitu “secara garis besar, pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian dimanifestasikan dalam institusi seperti parpol” (Firmanzah, 2007: 87).

2. Pemilu

Pemilu menurut Joseph Scumpeter adalah salah satu utama dari sebuah demokrasi merupakan suatu konsepsi salah satu konsepsi modern yang menempatkan penyelenggaraan pemilih umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebutkan sebagai sebuah demokrasi. Pemilu merupakan suatu pecerminan dari sistem demokrasi, dengan dilakukannya pemilu dianggap dapat menyuarakan suara rakyat yang sesungguhnya. Di negara-negara yang demokratis, pemilihan umum merupakan alat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dan sistem politik yang berlaku, oleh sebab pemberian suara pada saat pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik rakyat.

Pemilu merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk partisipasi dalam demokrasi perwakilan modern. Joko Prihatmoko mengutip dalam *Journal of Democracy*, bahwa pemilu disebut “bermakna” apabila memenuhi kriteria, yaitu keterbukaan, ketepatan, keaktifan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian kualitatif (*qualitatif research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok (Sukmadinata, 2005: 31)

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dari pada rincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait.

Pendekatan dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah kerja penelitian kualitatif, karena data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dalam penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan, jadi tidak menggunakan desain yang telah disusun secara ketat dan kaku sehingga tidak dapat diubah. Jadi penelitian masih bersifat sementara karena bisa diubah dalam hasil penelitian (Moleong, 2012: 11).

Informan Informan adalah orang yang dimintakan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Penentuan informan dilakukan secara purposively, yaitu informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai topik penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya, di samping informan yang dijadikan subjek penelitian dapat dipertanggung jawabkan (Bungin, 2011: 88).

Adapun informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang diteliti. Diantaranya adalah:

1. Anggota KIP Kota Banda Aceh
2. Ketua Bawaslu bagian Hukum
3. Masyarakat Kota Banda Aceh kecamatan ulekareng 2 orang
4. Masyarakat Kota Banda Aceh kecamatan kutaalam 2 orang

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Uraian lebih lanjut kedua jenis data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer digunakan sebagai data utama yang diperoleh dari informan. Data tersebut berupa gambaran dan pernyataan yang mendetail dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disusun dan diajukan oleh peneliti dalam proses wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai data/laporan instansi yang terkait serta studi-studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul dan tujuan penelitian

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk memudahkan peneliti dalam memahami pembangunan politik yang terjadi di masyarakat kecamatan Delima. Dengan demikian, peneliti melakukan analisis dengan menjiwai masyarakat agar bisa menarik kesimpulan pembangunan politik yang sesungguhnya.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang objek dan menyajikan sebagai penemuan bagi orang lain (Moloeng, 2006:66).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Golongan Putih Pada Pemilihan Pasangan Gubernur Aceh Antara Tahun 2012 Dengan Tahun 2017

Pemilihan kepala daerah Aceh Tahun 2012 di Kota Banda Aceh menunjukkan perbandingan yang tidak jauh berbeda terkait fenomena Golput pada Pilkada Aceh Tahun 2017. Jika merujuk kepada hasil persentase Golput pada Pilkada Aceh Tahun 2012 dengan persentase 44 % angka Golput, hal tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada Pilkada Aceh tahun 2017 di Kota Banda Aceh yang menunjukkan persentase sebesar 38 % angka Golput. Tentunya berdasarkan hasil tersebut, telah terjadi peningkatan angka pemilih pada Pilkada Aceh Tahun 2017 di Kota Banda Aceh dikarenakan telah menurunnya persentase angka Golput jika di bandingkan dengan fenomena Golput yang terjadi pada Pilkada Aceh Tahun 2012 di Kota Banda Aceh.

Perbandingan tren Golput yang terjadi di Kota Banda Aceh terkait Pilkada Aceh Tahun 2012 dan 2017 merupakan salah satu indikator suksesnya penyelenggara Pemilu dalam mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan Pilkada, hal tersebut dapat dilihat dari penurunannya angka Golput pada Pilkada Aceh Tahun 2017 di Kota Banda Aceh. Tren Golput sendiri kehadirannya dikarenakan oleh berbagai macam perilaku pemilih yang ada pada masyarakatnya. Jika merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Ramlan Subakti perilaku pemilih adalah keikutsertaan warga Negara dalam Pemilu ialah merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih (Ramlan Subakti, 2007).

B. Faktor Penyebab Terjadinya Golongan Putih Pada Pemilihan Pasangan Gubernur Aceh Tahun 2012 Dengan Tahun 2017

Pemilihan Umum yang merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat untuk memberikan hak suaranya guna memberikan kekuasaan kepada rakyat tidak terjadi pada tingkatan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh. Data KPU menyebutkan pada Pilkada Aceh Tahun 2017 menempatkan Kota Banda Aceh sebagai daerah nomor satu dengan angka Golput terbanyak di Provinsi Aceh, Kota Lhoksmawe menyusul menjadi Kota yang nomor dua yang menyumbangkan angka Golput yang tinggi. Hal tersebut terulang kembali pada Pilkada Aceh Tahun 2017, bedanya Kota Banda Aceh menduduki urutan kedua penyumbang Golput terbanyak, sementara Kota Lhoksmawe menempati urutan pertama (Portal KPU, 2017).

Pemilu sendiri menurut Ali Moertopo merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 (Ramlan, 1992). Namun, yang terjadi pada Pilkada Aceh tahun 2012 dan 2017 di Kota Banda Aceh, angka Golput masih sangat tinggi. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka Golput pada penyelenggaraan Pilkada di Kota Banda Aceh disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakatnya yang telah kecewa terhadap penyelenggaraan pemilihan sebelum-sebelumnya dan juga janji-janji politik yang belum terealisasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan :

1. Perbandingan fenomena angka Golput pada Pilkada Aceh Tahun 2012 dan 2017 di Kota Banda Aceh menunjukkan angka penurunan pemilih Golput sebesar 6 %. Penurunan fenomena angka golput pada Pilkada 2017 juga menurunkan urutan Kota Banda Aceh pada urutan kedua di Provinsi Aceh dari sebelumnya menduduki urutan pertama hasil Pilkada Aceh Tahun 2012 di Provinsi Aceh.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena angka Golput yang tinggi di pada Pilkada Aceh Tahun 2012 dan Tahun 2017 di Kota Banda Aceh adalah implikasi dari rasa kecewa masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kondisi politik Kota Banda Aceh. Kemudian juga faktor krisis legitimasi masyarakat terhadap Pemerintahan yang kebijakannya tak dirasakan langsung oleh masyarakat juga merupakan salah satu faktor tingginya fenomena angka Golput yang terjadi di Kota Banda Aceh.

Saran

1. Penyelenggara Pemilu harusnya benar-benar memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi terkait arti penting penggunaan hak politik atau hak suara terhadap masyarakat guna menghasilkan Pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak memilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan sia-sia seperti Golput atau tidak menggunakan hak pilihnya.
2. Partai Politik sebagai objek pada Pemilihan Umum juga seharusnya harus mengoptimalkan kader-kadernya terkait pendidikan politik untuk menghasilkan kader-kader partai yang berkualitas. Hal tersebut sangat dibutuhkan untuk mengembalikan krisis kepercayaan yang ada pada masyarakat kepada Partai Politik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Firmanzah. 2010. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik (Pembelajaran Politik Pemilu 2009)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Firmanzah. 2007. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kusnaedi. 2009. *Memenangkan Pemilu dengan Pemasaran Efektif*. Bekasi: Duta Media Tama.
- Miriam, Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Ramlan Subakti. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.
- Setiadi, Elly M dan Kolip Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 479
- Joseph Scumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, New York: Harper, 1947
- Elkit, J dan Severson, *Journal Of Democracy*, Page 8 dalam prihatmoto, Joko J. Mendemokratiskan Pemilu, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.

B. Skripsi

- Yoza Habibie, 2014. Fenomena golongan putih (golput) pada Pemilukada Walikota/Wakil Walikota 2012 di Kota Langsa. *Skripsi*. FISIP Unsyiah.
- Nuzul Apriliani dan Dr. Effendi Hasan, M.A., 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya golongan putih (golput) pada Pemilukada tahun 2012 di Kota Banda Aceh. *Skripsi*. FISIP Unsyiah.

C. Media Massa/Internet

- <http://golputbukandosa.blogspot.co.id/2014/01/pengertian-golput.htm>, di akses pada tanggal 7 maret 2017
- <http://www.kajianpustaka.com/2016/11/pemilihan-kepala-daerah-pilkada.html>, diakses pada tgl 16 april 2017
- <https://pilkada2017.kpu.go.id>, diakses pada 15 Maret 2017

<http://acehexpose.com/2016/08/26/bila-mengacu-data-survey-ini-kecil-sekali-peluang-aminullah-kalahkan-illiza>, diakses pada 20 mei 2017

<http://www.pikiranmerdeka.co/2017/03/03/anomali-kekalahan-petahana-koetaradja>, diakses pada 20 mei 2017

D. Jurnal ilmiah mahasiswa

Feryda Rinjani dan Effendi Hasan, (2016). *Kepercayaan Politik Pada Pilar Demokrasi (Suatu Analisis Terhadap Independensi Jsi Kota Banda Aceh Dalam Penyelenggaraan Survey Pra Pilkada 2017)* *Kepercayaan Politik Pada Pilar Demokrasi (Suatu Analisis Terhadap Independensi Jsi Kota Banda Aceh Dalam Penyelenggaraan Survey Pra Pilkada 2017)*, Vol 1, No 4.